



**ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)

MEDAN, 27 Mei 2021

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., AK., CA)

PEMBIMBING I

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, SH., M. Kn)

PEMBIMBING II

(Dito Aditiz Darma Nst, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)

MEDAN, 27 Mei 2021



(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Nina Andriany, SE., AK., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Maret 2021



MAYA RANTIKA DEWI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MAYA RANTIKA DEWI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 November 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100214
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 129 SKS, IPK 3.74
 Nomor Hp : 089666249500
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan)

Catatan : Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I.

(Cahya Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 21 Januari 2021

Pemohon,

(Maya Rantika Dewi)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 (Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi
 (Dr. Rahima b. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 21/01-2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
 (Dita Aditia Dharma Nst., SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Wa

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
08 Januari 2021	Sudah Acc Untuk Seminar Proposal.	Disetujui	
23 April 2021	Acc Sidang Meja Hijau.	Disetujui	
15 Juni 2021	Acc Jilid Lux.	Disetujui	

Medan, 17 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Wa

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 Januari 2021	ACC untuk Seminar Proposal (From: Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)	Disetujui	
05 April 2021	ACC untuk Sidang Meja Hijau	Disetujui	
15 Juni 2021	Acc untuk Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 17 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si

Ace Jilid 1
FAP

Ace Untuk Jilid 1
DAD Nadin



**ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MAYA RANTIKA DEWI
NPM : 1715100214

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Analyzed document: MAYA RANTIKA DEWI_1715100214_AKUNTANSI.docx Licensed for: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

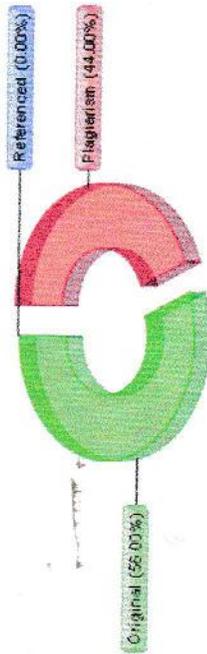
Comparison Preset: Rewrite [?](#) Detected language:

Check type: Internet Check



Deleted document body analysis:

[?](#) Revision chart



[?](#) Distribution graph:



[?](#) Top sources of plagiarism: 43

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



o. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MAYA RANTIKA DEWI

P. M : 1715100214

Tempat/Tgl. : MEDAN / 21 November 1998

Alamat : Jl. Bangun Sari No.86G LK.II Kedai Durian, Medan Johor

HP : 089666249500

Nama Orang : SUWANTO/AIDAH NURLIA

Keahlian : SOSIAL SAINS

Program : Akuntansi

Judul : ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



MAYA RANTIKA DEWI
1715100214

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4079/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: MAYA RANTIKA DEWI
: 1715100214
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Akuntansi

nyanya terhutang sejak tanggal 27 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 27 April 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
: 01
Efektif : 04 Juni 2015

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA RANTIKA DEWI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 23 November 1998
 Nama Orang Tua : SUWANTO
 N. P. M : 1715100214
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 089666249500
 Alamat : Jl. Bangpus Sari No.86G LK.Jl Kedel Durian, Medan Johor
 Dengan bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19** (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ke. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas laboratorium
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang Lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diijit lux 2. exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, Prodi dan Dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukkan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [231] Bebas LAB	: Rp.	1,100,000
Total Biaya		3,100,000

Ukuran Toga : **S**

Hormat saya

Dibuat/ditandatangani oleh :



MAYA RANTIKA DEWI
1715100214



Dr. Bambang Wijanarko, SE, MM.
Dekan Fakultas Sosial Sains

CINERAJA

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
- 2. Telah diisi dan diisi kelengkapan dari UPT Perputakaan UINIB Medan
- 3. 5. Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah aktif semester terdahulu
- 4. 3. Biaya Kertas 3 (tiga) jilid : Putih - Hitam 8000 (delapan ribu) - Rp. 300.000



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

bimbing I
 bimbing II
 mahasiswa
 program Studi
 kelompok Mahasiswa
 Pendidikan Judul
 Skripsi

: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si
 : DITO ADITIA DARMA NST, SE., M.Si
 : MAYA RANTIKA DEWI

: Akuntansi
 : 1715100214
 : Strata Satu (S-1)

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05 April 2021	<p style="text-align: center;">ACC Sidang Meja Hijau</p>		

Medan, 05 April 2021

Disetujui oleh :

Akuntansi



Ma Br Purba, SE., M.Si, AK., CA

Dosen Pembimbing II



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si
 Pembimbing II : DITO ADITIA DARMA NST, SE., M.Si
 Mahasiswa : MAYA RANTIKA DEWI
 Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100214
 Tingkat Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
18 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan format penulisan skripsi Saudara dengan pedoman penulisan skripsi Prodi Akuntansi UNPAB. - Cek kembali uji statistik yang Saudara lakukan, sesuaikan dengan metode penelitian Saudara di BAB III. - Uraikan secara lengkap dan sistematis hasil penelitian Saudara - Perkuat kembali Pembahasan penelitian Saudara dan kaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. - Cek kembali Daftar Pustaka Saudara, jangan ada kutipan yang terlewat dari BAB I s/d III. Disarankan menggunakan Aplikasi Sitasi Automatis (Mendeley). 		
27 Januari 2021	- ACC untuk Seminar Proposal		

Medan, 28 Januari 2021

Ditandatangani/Ditetujui oleh :

Prodi Akuntansi



Mahima Br Purba, SE., M.Si, AK., CA

Dosen Pembimbing II



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si
 Pembimbing II : DITO ADITIA DARMA NST, SE., M.Si
 Mahasiswa : MAYA RANTIKA DEWI
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1715100214
 Pendidikan Judul : Strata Satu (S-1)
 Akhir/Skripsi : **ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan)**

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05 Januari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan teori yang mendasari latar belakang masalah, urgency pentingnya penelitian 2. Penyempurnaan tinjauan pustaka dan teori dengan menambahkan undang2 atau peraturan yang sesuai dengan penelitian 3. Perbaikan dan sesuaikan identifikasi masalah dan rumusan masalah 4. Penyempurnaan isi bab II 5. Koreksi kesalahan penulisan 6. Perbaikan pengutipan referensi. 7. Perubahan referensi buku dalam 10 tahun terakhir 8. Perbaikan tabel jadwal penelitian 9. Daftar pustaka disusun berurut 		
7, Januari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cantumkan data2 pendukung latar belakang masalah 2. Teori2atau refrensi yang relevan 3. Sesuaikan jenis dan sumber data 4. Buat draf wawancara jika diperlukan dan lampirkan draf kuesioner dan cantuknkan sumber nya. 5. Daftar pustaka disesuaikan dengan yang ada diisi. 		

Medan, 08 Januari 2021

ahui/Disetujui oleh : Dekan,

odi



Rahma Br Durba, SE., M.Si., AK., CA

Dosen Pemimbing

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Populasi penelitian ini merupakan pegawai pemerintah yang menjalankan fungsi keuangan di kantor BPKAD Kota Medan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Yang mana kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kepala BPKAD, bagian keuangan, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang pembukuan dan bidang pelaporan sehingga diperoleh responden sebanyak 40 orang. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan berupa angket kuesioner dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian parsial (uji-t), uji simultan (uji-F) dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan alat uji SPSS versi 22.0.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19*. Kemudian secara simultan variabel independen berpengaruh bersama-sama dan signifikan terhadap variabel dependen dan hasil uji koefisien determinasi nilai *R square* (R^2) menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 61,1%.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan, *Covid-19*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of accountability and transparency on the quality of financial reports during the Covid-19 pandemic in the Regional Financial and Asset Management Agency of Medan City. The populations of this study is government employees who carry out financial functions at the BPKAD office of Medan City. The sampling technique uses purposive sampling. The criteria for the sample in this study were the head of the BPKAD, the finance department, the budget sector, the accounting sector, the bookkeeping sector and the reporting sector so that 40 respondents. The data used are primary data collected in the form of a questionnaire and secondary data. This research uses descriptive analysis, multiple linear regression analysis and classic assumption test consisting of normality test, heteroscedasticity test and hypothesis testing carried out by partial testing (t-test), simultaneous test (F-test) and determination coefficient test (R^2) with SPSS version 22.0.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that partially the accountability and transparency variables have a significant effect on the quality of financial reports during the Covid-19 pandemic period. Then simultaneously the independent variables have a joint and significant effect on the dependent variable and the test result of the coefficient of determination of the value of R square (R^2) show that the independent variable has an effect of 61,1%.

Keywords: *Accountability, Transparency, Quality of Financial Reports, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI *COVID-19* (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih mengalami banyak kesulitan dan kendala. Kendala tersebut dapat penulis atasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Maka dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., AK., CA sebagai Ketua program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, pengetahuan, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu dalam perbaikan sistematika penulisan skripsi ini.
6. Bapak Tengku Ahmad Sofyan, SE., AK., MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang telah mengizinkan saya melaksanakan riset penelitian.
7. Bapak/Ibu Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu atas informasi yang telah diberikan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
8. Orangtua saya tercinta, Suwanto dan Aidah Nurlia, adik Bunga Andita serta keluarga yang senantiasa selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan moril maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan dan semangat serta bersedia mengulurkan bantuan kepada penulis dalam proses penelitian guna untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Akuntansi serta semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan, 21 Maret 2021
Penulis,

MAYA RANTIKA DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiiiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2. Batasan Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan	15
2.1.3. Akuntabilitas	23
2.1.4. Transparansi	28
2.2. Penelitian Sebelumnya	33
2.3. Kerangka Konseptual	35
2.4. Hipotesis	36

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2.1. Lokasi penelitian.....	37
3.2.2. Waktu Penelitian.....	37
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.3.1. Populasi Penelitian.....	38
3.3.2. Sampel Penelitian	38
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39
3.4.1. Variabel Penelitian.....	39
3.4.2. Definisi Operasional	40
3.5. Jenis dan Sumber Data	42
3.5.1. Jenis Data	42
3.5.2. Sumber Data.....	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data	43
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
3.7.1. Uji Kualitas Data	44
3.7.2. Uji Asumsi Klasik.....	45
3.7.3. Uji Hipotesis.....	46
3.7.4. Uji Regresi Linear Berganda.....	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	49
4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan	49
4.1.2. Logo Kota Medan	50
4.1.3. Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	51
4.1.4. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan	52
4.1.5. Struktur Organisasi	58
4.1.6. Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Medan	58
4.1.7. Penyajian Uji Kualitas Data	69
4.1.8. Uji Asumsi Klasik.....	71
4.1.9. Hasil Pengujian Hipotesis	74
4.2. Pembahasan	78

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Rincian Anggaran Negara Untuk Penanganan <i>Covid-19</i>	4
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya.....	33
Tabel 3. 1 Skedul Proses Penelitian.....	38
Tabel 3. 2 Daftar Populasi Penelitia	38
Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian	39
Tabel 3. 4 Kriteria Pengukuran Skala <i>Likert</i>	41
Tabel 3. 5 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian	42
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1).....	69
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_2)	70
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	70
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas	71
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov (K-S)	73
Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial (Uji-t).....	75
Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan (Uji-F)	76
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76
Tabel 4. 9 Uji Regresi Linear Berganda.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Anggaran Covid-19.....	3
Gambar 1. 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	7
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 4. 1 Logo Kota Medan	50
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan	58
Gambar 4. 3 Grafik Histogram.....	72
Gambar 4. 4 Grafik Normal Probability Plott	72
Gambar 4. 5 Gambar <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (Sars-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *coronavirus 2019-2020*. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) mendeklarasikan wabah *coronavirus 2019-2020* sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (*PHEIC*) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020 (Sumber: Wikipedia).

Pertanggal 14 Januari 2021 data statistik merangkum total kasus *Covid-19* di seluruh dunia mencapai 91,6jt kasus dengan tingkat kematian 1,96jt jiwa dan pasien sembuh mencapai 50,6jt jiwa. Disusul dalam negeri kasus *Covid-19* mencapai 847rb, angka kematian 24,645rb jiwa dengan pasien sembuh sebanyak 696rb jiwa (Sumber: Wikipedia).

Cepatnya penyebaran virus yang merenggut nyawa ini menjadikan berbagai negara di belahan dunia mengalami kekhawatiran juga kewalahan dalam upaya penanganan maupun pencegahan. Tak dapat dipungkiri bahwa musibah ini telah berhasil memporak-porandakan seluruh dunia dengan sangat cepat dan meninggalkan dampak luar biasa merugikan. Perkembangan penularan virus yang sangat signifikan ini menjadikan dunia mengalami

kondisi darurat global termasuk Indonesia. Hal yang sangat jelas terlihat adalah sangat menurunnya perekonomian nasional.

Dengan cepatnya penyebaran virus corona yang semakin merajalela membuat pemerintah Indonesia harus terus sigap dalam mengambil kebijakan demi menekan angka penurunan *Covid-19*. Sejak Maret 2020, berbagai aturan dan kebijakan harus diterapkan ditengah masyarakat. Pemberlakuan *lockdown* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dijanjikan agar pemerintah dapat meminimalisir angka penyebaran virus corona.

Adanya pandemi ini yang membuat terhambatnya aktivitas di tengah masyarakat menjadikan pemerintah harus berfikir keras untuk memberikan kesejahteraan rakyat agar dapat terus bertahan hidup ditengah musibah ini terutama dalam hal perlindungan sosial salah satunya dengan membantu ekonomi rakyat. Dalam rangka penanganan *Covid-19*, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020.

Pertama, *Refocusing* Anggaran K/L dan Pemda untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas *Covid-19*. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak *Covid-19* (Sumber : Kemenkeu.go.id)

Anggaran *Covid-19* yang tidak pernah ada pada tahun sebelumnya menjadi tuntutan besar bagi pemerintah dalam hal pemerataan sosial. Realisasi Anggaran *Covid-19* diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang diganti menjadi

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.



Sumber: Kemenkeu, November 2020

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Anggaran Covid-19

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kenaikan anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19* terus terjadi setiap bulan hingga 18 November 2020. Ini membuktikan bahwa semakin besarnya kasus *Covid-19* di Indonesia juga menjadikan semakin tingginya anggaran yang dibutuhkan.

Namun Per Desember 2020 Pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan *Covid-19* menjadi Rp 677,2 triliun yang semula hanya Rp 408,61 triliun pada November 2020. Angka ini membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67%. Realisasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran Negara Untuk Penanganan Covid-19

No.	Realisasi	Anggaran
1	Bidang Kesehatan : Penanganan Covid-19, belanja tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan	Rp 87,55 triliun
2	Perlindungan sosial masyarakat : Pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos), Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, BLT dan dana desa	Rp 203,9 triliun
3	Sektor UMKM : Pembiayaan subsidi bunga, pendukung modal, belanja pinjaman terhadap kredit modal kerja darurat.	Rp 123,46 triliun.
4	Insentif dunia usaha dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lain	Rp 120,61 triliun
5	Pendanaan korporasi BUMN dan padat karya	Rp 44,57 triliun
6	Dukungan sektoral K/L dan Pemda	Rp 97,11 triliun.

Sumber : Kompas.com (data diolah oleh penulis)

Anggaran disalurkan pemerintah pusat ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Medan. Medan yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara juga sekaligus menjadi kota terbesar ke-3 di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya juga wajib mendapat perhatian besar dari pemerintah terkait penanganan dan pencegahan pandemi yang ada. Kota Medan termasuk salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1.250.000 jiwa. Situasi ini tentu menjadikan wabah pandemi Covid-19 terus berkembang dengan sangat pesat dan cepat dalam waktu singkat apalagi mengingat Medan yang telah berstatus zona merah pandemi Covid-19. Pemerintah Medan sendiri memiliki alokasi dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 500 miliar dari refocusing anggaran. Sebesar Rp 100 miliar di antaranya sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.

Besarnya angka untuk penanganan Covid-19 menjadikan Pemerintah Kota Medan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pengelola keuangan kepada atasan juga masyarakat. Kemana arah sasaran anggaran tersebut, berapa jumlah dana yang dikeluarkan serta apa saja yang

akan dikeluarkan. Dikarenakan sumber dana pengelolaan daerah berasal dari rakyat, maka pemerintah kota Medan wajib melangsungkan segala aktivitas di dalam pemerintahan dengan jujur dan terbuka anggaran.

Pencatatan segala bentuk aktivitas yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah Kota Medan harus sesuai standar pelaporan agar menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pemerintah daerah Kota Medan harus melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pelaksanaan kegiatan pemerintah hingga penyajian pelaporan keuangan.

Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif, yaitu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengukuhkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus tersaji dan dilaporkan dengan baik dan sesuai

standar yang berlaku, juga harus dibuktikan dengan hasil opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Demi terwujudnya kualitas laporan keuangan serta terciptanya prinsip *Good Governance*, maka organisasi harus memiliki prinsip akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparance*), independensi (*independency*), tanggungjawab (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Peraturan Pemerintah ini sebagai penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang disusun untuk menjaga tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adanya aturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah seharusnya membuat pemerintah semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi dan dapat melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik sumber dan kejelasan sasaran anggaran untuk *Covid-19*.

Kepercayaan masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan yang dapat dibilang masih rendah yang mana masih adanya indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa anggaran yang diberikan pemerintah pusat tidak akan tepat sasaran terlebih dengan adanya pandemi *Covid-19*. Salah satu faktor ketidakpercayaan masyarakat pada pengelola keuangan negara maupun daerah pada pemerintah di Indonesia dikarenakan kurangnya akuntabilitas dan

transparansi pada laporan keuangan keuangan. Ini juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK untuk Kota Medan selama 4 tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) seperti tertulis dalam gambar di bawah ini.



Sumber : sumut.bpk.go.id

Gambar 1. 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Dana bantuan sosial *Covid-19* dapat menimbulkan celah bagi seseorang atau beberapa kelompok untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah terhadap pendistribusian dana terkait anggaran untuk *Covid-19* ditahun 2020.

Salah satu dugaan penyelewengan dana *Covid-19* terbukti dengan dikeluarkannya surat panggilan dengan Nomor: R-694/L.2.5/F.d.1/06/2020 yang dituju kepada Kepala BPKAD Kota Medan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kepala BPKAD, Tengku Ahmad Sofyan selaku Koordinator bidang Keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak *Covid-19* yang dikelola Pemkot Medan pada 2020. Dalam penyelidikan terdapat empat titik rawan korupsi dalam penanganan *Covid-19* yaitu pengadaan barang dan jasa, filantropi atau

sumbangan pihak ketiga, *refocusing* dan realokasi anggaran, serta penyelenggaraan bantuan sosial (Sumber: Kompas.com).

Dengan adanya dugaan penyelewengan di Pemkot Medan ini, membuktikan bahwa memang perlu adanya pelaporan keuangan yang semakin berkualitas dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah Kota Medan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Negara dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang semakin berkualitas dari tahun sebelumnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin meski kurangnya kepercayaan masyarakat akibat pandemi *Covid-19*, sehingga masyarakat tidak perlu merasa cemas mengenai apakah dana untuk anggaran *Covid-19* telah tersalurkan dengan tepat sasaran atau tidak.

Pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat untuk dapat merpertanggung jawabkan aktivitasnya. BPKAD Kota Medan harus mampu menyajikan laporan dalam bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik dalam penanganan *Covid-19*. Anggaran *Covid-19* yang disalurkan oleh Pusat harus memiliki kejelasan sasaran yang tepat, dan harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang tersaji secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan serta mendapatkan hasil opini baik dari BPK.

Jika laporan keuangan tahun ini berhasil disajikan dengan baik, maka kinerja pemerintah daerah dapat dipastikan akan meningkat dan pemulihan ekonomi di Kota Medan akan mengalami peningkatan dengan cepat serta

kepercayaan masyarakat akan terus tumbuh. Sedangkan kenyataannya, pengelolaan keuangan daerah ditahun ini masih mendapat perhatian dan kekhawatiran dikalangan masyarakat terkait penyajian laporan keuangan dikarenakan adanya anggaran baru untuk *Covid-19* yang tidak pernah ada perencanaan ditahun sebelumnya. Oleh karena itu, adanya pandemi *Covid-19* seharusnya membuat pemerintah untuk dapat semakin membuktikan bahwa pemenuhan hak publik adalah nomor satu dan kepercayaan masyarakat wajib terjawab dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas dengan mampu mempertahankan opini WDP atau bahkan dapat meraih WTP.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI *COVID-19* (Studi Kasus di Kantor Wali Kota Medan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang terjadi diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak terwujudnya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dapat memperburuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.
2. Lemahnya kinerja pemerintah daerah Kota Medan dapat terjadi karena kurangnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19*.

3. Salah satu faktor ketidakpercayaan masyarakat pada pengelola keuangan negara maupun daerah pada pemerintah di Indonesia termasuk Kota Medan dikarenakan kurangnya akuntabilitas transparansi pada laporan keuangan.

1.2.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan materi skripsi ini tidak meluas, maka penulis hanya membatasi pada permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah pada masa *Covid-19* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan)?
2. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan).

2. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan).

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian dapat berguna bagi siapapun yang membutuhkannya, terutama :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam hal pelaporan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Medan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi serta dapat menjadi rujukan dan perbandingan penelitian yang sejenis untuk waktu yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai informasi, acuan dan bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah untuk periode selanjutnya di Kota Medan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Davit Agus Prakoso (2019) dari Universitas Widya Dharma Klaten yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem

Pengendalian Internal dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (Studi Empiris di BPKD Kabupaten Klaten)”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Kantor Walikota Medan).

Beberapa perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel Penelitian

Penelitian sebelumnya menggunakan 4 variabel bebas (Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Teknologi) dan 1 variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan). Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas (Akuntabilitas dan Transparansi) dan 1 variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *agency theory* sebagai *grand theory*, disamping konsep-konsep kualitas laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi. Pengertian masing-masing akan dibahas dalam bab II ini.

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan berusaha menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Bergman dan lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Miriam Budiarjo (1994) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Dalam konteks organisasi sektor publik, senada dengan Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya penyelewangan oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan terjadinya penyelewangan menjadi lebih kecil.

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014) dalam Chairani (2020).

Sementara berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 01 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan “Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2018).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya (Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 01 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Sementara tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum menurut Mardiasmo (2018) adalah :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Restrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, sebagai pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and figure*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

“Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Paragraf Standar Nomor 14 Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Lampiran I.02).”

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Sukemi, 2011) dalam Bintang (2016).

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan laporan keuangan dirinci sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
3. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit di pemerintah.
4. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
5. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
6. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasi.
7. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria

yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.

- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
- c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equility*) dan keadilan (*equity*).

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Laporan keuangan pemerintah disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu karena kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

2.1.2.2. Mengukur Laporan Keuangan yang Berkualitas

Kualitas laporan keuangan merupakan sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka (Surastiani & Handayani, 2015) dalam Chairani (2020).

Pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang mampu menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu, serta memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang membantu pengguna memprediksi masa depan atas kejadian masa kini.

2. Andal

Karakteristik yang apabila penyajiannya secara jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila diuji lebih dari satu pihak akan tetap menghasilkan hasil yang sama dan tidak jauh berbeda (netral).

3. Dapat Dibandingkan

Laporan yang dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lain.

4. Dapat Dipahami

Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai :

1. Sebagai media transparansi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai media akuntabilitas publik. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.
3. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

4. Sebagai sarana evaluasi kinerja, laporan keuangan pemerintah berguna untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan, diantaranya berupa (1) menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode sebelum nyadan dengan kinerja unit yang lain, (2) mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan, (3) mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target, (4) mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja keuangan pihak pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan, maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan. Dalam masa pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia di tahun ini, kualitas laporan keuangan menjadi sangat penting karena berbagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur anggaran dalam proses penggunaan dana terutama dalam penanganan masalah *Covid-19*. Kualitas laporan keuangan harus transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi para penggunanya. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat mengingat

pengelolaan anggaran pemerintah merupakan organisasi yang sumber pendanaan berasal dari rakyat.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan merancang prosedur dan aturan mengenai pelaporan realisasi anggaran berbasis kinerja yang mengintegrasikan laporan kinerja dan realisasi anggaran. Dengan adanya laporan tersebut, maka diharapkan laporan keuangan tidak hanya sebagai wujud dari pertanggungjawaban namun menjadi bahan informasi dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara bukan hanya berorientasi pada prosedur tetapi berorientasi pada hasil.

2.1.3. Akuntabilitas

2.1.3.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 Nomor 14 menerangkan bahwa “Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik”.

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang akan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2018) . Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan pemerintah. *Concept Statement* No.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Media pertanggung jawaban akuntabilitas tidak terbatas pada pelaporan pertanggung jawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggung jawaban (Sulistiyani, 2011) dalam Hanifah (2015).

Ismiarti (2013) dalam Lucy et al (2013) menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Scoot yang dikutip Mulyana (2006) dalam Bintang (2016) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Seluruh pernyataan mengenai akuntabilitas tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

2.1.3.2. Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas yang diharuskan dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Ellwod (1993) dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountablity for probily*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

2.1.3.3. Pelaksanaan Akuntabilitas Sektor Publik

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah.

. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997) dalam Mardiasmo (2018). Akuntabilitas publik berorientasi pada dua tanggung jawab, yaitu :

1. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) daripada pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Instrumen utama dari akuntabilitas adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan keuangan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende et al, 2004) dalam Sriwijayanti (2018).

2.1.4. Transparansi

2.1.4.1. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Pasaribu (2011) dalam Lucy et al, (2013) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Lucy et al, 2013).

Konsep *Good Corporate Governance* memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan

mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi dan meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan.

Transparansi yang merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* diartikan sebagai keterbukaan atas segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas maupun institusi. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat luas. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola kebijakan dan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya serta ketaatannya atas perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Hal ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

1. Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan *netopisme* (KKN).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, dan tidak diskriminatif tentang perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi, Untuk melaksanakan semua itu, “media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012) dalam Nst (2018).

Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang menjadi kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Termasuk pula unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Untuk menunjang terlaksananya

prinsip transparansi, pemerintah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan akan dapat meminimalisir berkurangnya penyimpangan atas penyelenggaraan dalam pengelolaan pemerintah daerah.

2.1.4.2. Indikator Transparansi

Perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Dwiyanto (2006) dalam Karjuni (2019) mengungkapkan ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintah, antara lain :

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
2. Seberapa mudah proses peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders*. Aturan dan prosedur bersifat “*simple, straightforward, and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
3. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dapat dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan dapat mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Menurut Krina (2003) dalam Lilis et al (2020) menerangkan bahwa prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator, seperti :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi, serta penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Oleh karena itu, ini menunjukkan arti bahwa konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan publik merupakan syarat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya penulis gunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini. Tujuannya sebagai penulis mendapat pemahaman dalam tahapan penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya tersebut adalah :

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
Khaliza Chairani (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Pekanbaru	Akuntabilitas (X ₁) Transparansi (X ₂) Kompetensi SDM (X ₃) Sistem Informasi (X ₄)	Kualitas Laporan Keuangan	Regresi Berganda Uji-t Uji-F	Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Sistem Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen dan hasil koefisien determinasi nilai R square (R ²) menunjukkan variabel independen berpengaruh 86,8%.
Agus Davit Prakoso (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	Akuntabilitas (X ₁) Transparansi (X ₂) Sistem Pengendalian Intern (X ₃) Peran Teknologi Informasi (X ₄)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linier Berganda Uji-t Uji-F Uji koefisien determinan	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan Akuntabilitas, Transparansi, Sistem

					Pengendalian Internal dan Peran Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Annisa Ramadhani (2019)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur (Studi Kasus Pada Organisasi Pemerintah Daerah OKU Timur)	Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) Akuntabilitas (X_2) Transparansi (X_3)	Kinerja Pemerintah Daerah	Uji Regresi Linear Berganda	Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hari Sriwijayanti (2018)	Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang)	Transparansi (X_1) Akuntabilitas (X_2) Sistem Informasi Akuntansi (X_3)	Pengelolaan APBD	Regresi Linier Sederhana Uji-t Uji-F	Transparansi, Akuntabilitas dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APB baik secara parsial maupun simultan.
Rahmat Bintang (2016)	Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Akuntabilitas (X_1) Ketidakpastian Lingkungan (X_2) Komitmen Pimpinan (X_3) Pengendalian Internal (X_4)	Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	Regresi Berganda dan Regresi Sedang	Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Sumber : Data diolah dari Website

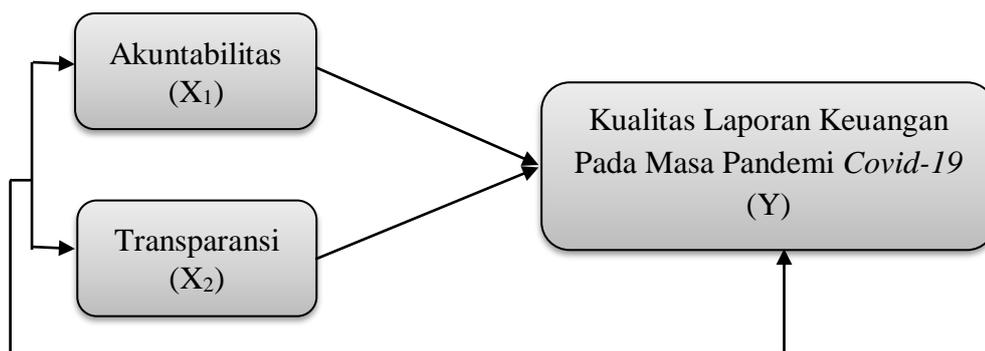
2.3. Kerangka Konseptual

Dalam praktiknya, tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Umumnya penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang tumbuh secara positif. Pertumbuhan yang demikian dapat dicapai apabila seluruh pejabat pemerintah dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar pertanggungjawaban dan kesadaran dalam penyusunan laporan keuangan akan menunjukkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya. Penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemegang kekuasaan negara.

Jika semua Standar Akuntansi dapat diterapkan dengan maksimal, maka perwujudan kinerja keuangan pemerintah secara positif akan terealisasi dan jelas serta dapat meminimalisir timbulnya kecurangan (*fraud*) dalam bentuk apapun.

Dalam Prakoso (2019) menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Chairani (2020) yang menunjukkan hasil yang sama.

Berdasarkan beberapa teori yang telah terpapar diatas, latar belakang masalah, kesimpulan penelitian sebelumnya, maka peneliti menyusun kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan kerangka konseptual tersebut diatas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hipotesis asosiatif. Sugiyono (2015) menjelaskan, “hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2015) “Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015). Penelitian ini membahas pengaruh variabel bebas (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember 2020 hingga selesai. Perencanaan tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skedul Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2020		2021					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun
1.	Pengajuan Judul/Riset Awal	■							
2.	Penyusunan Proposal		■	■					
3.	Seminar proposal				■				
4.	Perbaikan/Acc Proposal					■			
5.	Pengolahan Data					■			
6.	Penyusunan Skripsi						■		
7.	Bimbingan Skripsi							■	
8.	Sidang Skripsi								■

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1. Populasi Penelitian

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah yang bekerja di Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Medan. Adapun jumlah pegawai yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 102 orang.

Tabel 3. 2 Daftar Populasi Penelitian

No.	Kategori	Kuantitas
1	Pegawai Negeri Sipil	71
2	Honorer	32
3	Jumlah Populasi	103 orang

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.2. Sampel Penelitian

Sugiyono (2015) menyatakan definisi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel:

1. Sampel pada penelitian ini adalah pejabat yang bekerja di dalam kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan.
2. Sampel penelitian ini merupakan kepala badan instansi, seluruh kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian dan/atau anggota (staf) bidang yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Kriteria		Jumlah
		1	2	
1	Kepala Badan	√	√	1
2	Kasubbag Keuangan	√	√	1
	Staf Bidang Keuangan	√	√	7
3	Kabid Anggaran	√	√	1
	Staf Bidang Anggaran	√	√	11
4	Kabid Akuntansi	√	√	1
	Staf Bidang Akuntansi	√	√	7
5	Kasubbid Pembukuan	√	√	1
	Staf Bidang Pembukuan	√	√	4
6	Kasubbid Pelaporan	√	√	1
	Staf Bidang Pelaporan	√	√	5
Total Seluruh Sampel				40 sampel

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu : variabel pertama Akuntabilitas (X_1) dan variabel kedua Transparansi (X_2) serta variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian dari penelitian yang memberikan penjelasan variabel-variabel operasional. Menurut Sugiyono (2015) “definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, antara lain:

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik pengaruh negatif maupun positif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2)

2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Dikatakan variabel terikat karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan(Y) Indikator yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Indikator Akuntabilitas (X_1), yaitu indikator yang memperjelas variabel akuntabilitas dengan pendekatan : akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
2. Indikator Transparansi (X_2), yaitu indikator yang memperjelas variabel transparansi yang meliputi : tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan, kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan dalam memahami segala proses peraturan dan prosedur pelayanan.

3. Indikator Kualitas Laporan Keuangan (Y), yaitu indikator yang memperjelas variabel kualitas laporan keuangan dengan memenuhi kriteria yang meliputi : relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Dalam penelitian ini skala pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan Skala *Likert*. Sugiyono (2015) menyebutkan bahwa "Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Umumnya skala *Likert* mengandung pilihan jawaban : Sangat Setuju, Setuju, Netral/Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Skor untuk jawaban itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Kriteria Pengukuran Skala *Likert*

Kriteria	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral/Ragu-ragu (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono, 2015

Berikut ini disajikan tabel definisi operasional variabel penelitian, indikator variabel penelitian, dan skala ukur terhadap variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X ₁)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002)	a. Kejujuran b. Tepat Waktu c. Pelayanan Publik d. Partisipasi Publik e. Tepat Sasaran f. Kepatuhan Hukum (Sumber : Hari Sriwijayanti, 2016)	<i>Likert</i>
Transparansi (X ₂)	Transparansi adalah keterbukaan (<i>openness</i>) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Mardiasmo dalam Ony dan Irvan, 2014)	a. Periodik dan tepat waktu b. Kemudahan akses informasi c. Kelengkapan informasi d. Publikasi ke media massa e. Pemerataan informasi (Sumber : Khaliza, 2020)	<i>Likert</i>
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka. (Surastiani & Handayani dalam Khaliza, 2020)	a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami (Sumber : Davit Agus, 2019)	<i>Likert</i>

Sumber : Data diolah oleh penulis

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya”. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Sugiyono, 2015).

3.5.2. Sumber Data

Dilihat melalui jenis dan sumber datanya, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Sumber data primer

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa “sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Peneliti mendapat sumber data primer melalui data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, diperoleh dari responden melalui jawaban kuesioner yang dibagikan ke masing-masing bidang (anggaran, akuntansi, pelaporan) maupun sub bidang (keuangan, pembukuan), hasil wawancara, serta data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data sekunder yang peneliti ambil adalah berupa literatur (bahan bacaan), data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung yang melengkapi penelitian ini seperti buku-buku literatur, skripsi, jurnal, artikel, internet, referensi lain dan sebagainya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi skripsi yang akan dibahas.

2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke obyek penelitian, seperti :
 - a. Angket (Kuesioner), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pernyataan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
 - b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menguji analisis kualitas data dengan uji validitas dan reabilitas kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.1. Uji Kualitas Data

3.7.1.1. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2011), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r -hitung dengan nilai r -tabel untuk *degree of freedom* (df)= $n-2$. Jika r -hitung $>$ r -tabel dan nilai positif, pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r -hitung $<$ r -tabel, pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2011). Kriteria yang

ditetapkan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu adalah r -hitung $>$ r -tabel pada taraf signifikan 5% atau 0,05. Bila r -hitung $<$ r -tabel maka alat ukur tersebut tidak memenuhi kriteria valid (Ghozali, 2011).

3.7.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011), uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas data yaitu dengan menggunakan metode *consistency reliability* yang menggunakan uji *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.70 (Ghozali, 2011).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak (Ghozali, 2011). Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak *valid* untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan bantuan program statistik. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* yang ditentukan, yaitu 5%, maka data dikatakan

berdistribusi normal, dan sebaliknya jika probabilitas kurang dari 5%, maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat pola gambar *scatterplot*. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat nilai signifikan dengan ketentuan :

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kantor Wali Kota Medan.

3.7.3.1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat

(Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Menurut Ghozali (2011), penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_a diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_a ditolak, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

Atau dengan membandingkan signifikansi 5% dengan nilai α .

1. Apabila signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima.
2. Apabila signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak.

3.7.3.2. Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual secara statistik (Ghozali, 2011). Uji-F akan menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara simultan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan menurut Ghozali (2011) adalah :

1. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_a diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
2. Jika $F\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ maka H_a ditolak, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

Atau dengan membandingkan signifikansi dengan nilai α .

1. Apabila signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima.
2. Apabila signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak.

3.7.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai (*Adjusted R²*) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011). Berikut adalah cara menghitung koefisien determinasi R^2 :

$$R^2 = \frac{JK(Reg)}{\Sigma Y^2}$$

3.7.4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dibutuhkan untuk menghitung nilai koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan)
 β_1X_1 = Koefisien regresi variabel bebas X_1 (Akuntabilitas)
 β_2X_2 = Koefisien regresi variabel bebas X_2 (Transparansi)
 a = konstanta
 e = *error of term*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Secara geografis, Kota Medan terletak di antara koordinat 2°27' sampai dengan 2°47' Lintang Utara dan 98°35' sampai dengan 98°44' Bujur Timur. Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara yang merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia.

Secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2018 diperkirakan telah mencapai 2.264.145 jiwa. (Sumber : Badan Pusat Statistik)

Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sector tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.

4.1.2. Logo Kota Medan



Sumber : Pemkomedan.go.id

Gambar 4. 1 Logo Kota Medan

Lambang Kota Medan memiliki beberapa makna yang terdiri dari :

1. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.

Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bahagian perisai berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

4.1.3. Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Medan berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standard operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

4.1.4. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan

4.1.4.1. Visi BPKAD Kota Medan

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

Sejalan dengan berdirinya BPKAD Kota Medan, maka Visi dan Misi BPKAD Kota Medan adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH
KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN**

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIENSI DAN EFEKTIF”.

Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Profesional

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.

Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi.

2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan

Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota Medan sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan.

3. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Berpengabdian

Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan sehingga penerapan prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.

4. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.

5. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan

daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

4.1.4.2. Misi BPKAD Kota Medan

Misi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan dapat tercapai, yaitu dengan :

1. Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan

Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan Transparansi, Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian,

keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif.

3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Teknologi Yang Lebih Baik

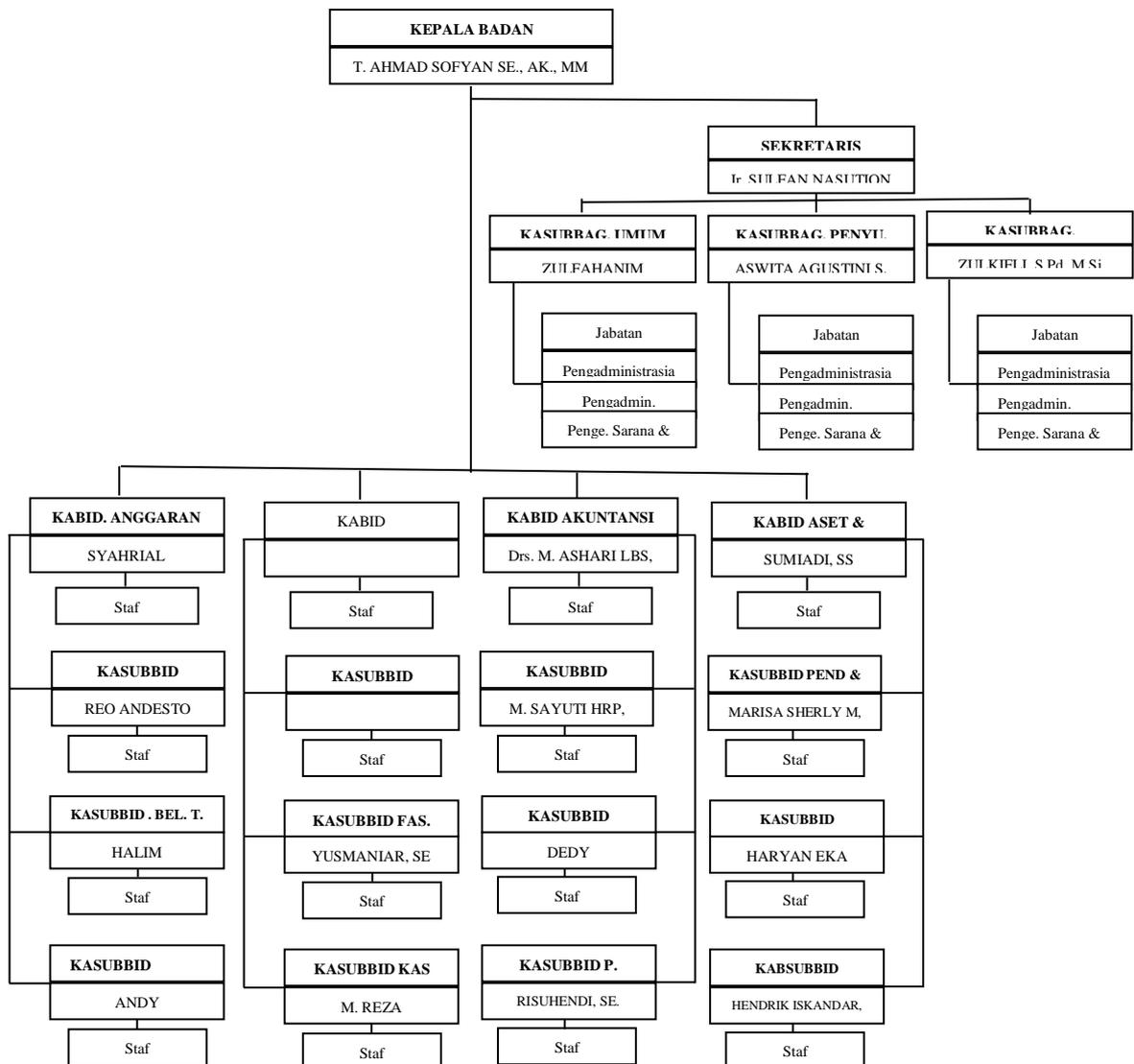
Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang *good governance*.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan

Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan.

4.1.5. Struktur Organisasi

Peta Jabatan Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Medan



Sumber : Kantor BPKAD Kota Medan, tahun 2021

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan

4.1.6. Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Medan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2017, berikut rincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sesuai dengan struktur organisasi, antara lain:

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada keuangan dan aset daerah. Dalam menjalankan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan. Lingkup kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program, serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penialaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Badan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup badan sesuai dengan usulan bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan

umum lainnya lingkup badan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;

- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya.
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang anggaran dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup bidang anggaran untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendstribusi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang anggaran berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian KUA dan PPAS dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- e. Pengoordinasian RKA SKPD;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usulan SKPD;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan pengesahaan DPA/DPPA SKPD;
- h. Pelaksanaan penyusunan SPD sesuai DPA DPPA SKPD;
- i. Pengevaluasian laporan realisasi SPD SKPD;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan hibah dan bantuan sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Pengevaluasian laporan kinerja program bidang anggaran;
- l. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang anggaran meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan rumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- m. Pelaksanaan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban pada kepala badan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Anggaran membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang Pendapatan
- 2) Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- 3) Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala badan lingkup gaji, belanja, dan kas. Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Perbendaharaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN dalam rangka untuk

kelancaran tugas lingkup Bidang Perbendaharaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, dan kas;
- e. Pelaksanaan penyusunan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- f. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, dan kas;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perbendaharaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang Belanja
- 2) Kepala Sub Bidang Kas

3) Kepala Sub Bidang Fasilitas Gaji

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup akuntansi. Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Akuntansi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Akuntansi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;
- e. Pengoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan, serta bidang penatausahaan keuangan;
- g. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

- h. Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosa 6 (enam) bulan berikutnya;
- i. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan;
- j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi;
- k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Akuntansi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur0unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan:
- l. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaran kebijakan lainnya berdasarakan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Akuntansi membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang pembukuan
- 2) Kepala Sub Bidang Pelaporan
- 3) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

6. Bidang Aset dan Investasi

Kepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan

inventarisasi aset, pengendalian dan pengawasan aset, dan pembiayaan dan investasi. Kepala Bidang aset dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Aset dan Investasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Aset dan Investasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Aset dan Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan data untuk pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
- e. Penyusunan bahan dan data untuk pelaksanaan rekapitulasi laporan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah yang meliputi rekapitulasi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan pengkajian terhadap pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan tuntutan ganti rugi atas pengelolaan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pengelolaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan analisa bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- k. Pelaksanaan pengkajian terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, rencana pembiayaan dan rencana investasi atas nama pemerintah daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan asistensi penatausahaan aset pemerintah daerah;
- m. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Aset dan Investasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Aset dan Investasi membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi;
- 2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Aset; dan
- 3) Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.

1.1.7. Penyajian Uji Kualitas Data

1.1.7.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan angket dalam mengumpulkan data. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan secara statistik dengan menggunakan program IBM Statistical Package for the Social Sciences atau Statistical Program and Service Solutions (SPSS) versi 22.0. Item angket dalam uji validitas dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel pada taraf nilai signifikansi 5% (0,05), begitu sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel maka item dikatakan tidak valid pada taraf nilai signifikansi 5% (0,05).

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X₁)

No item	R _{xy}	R _{tabel (5%)}	Keterangan
1	0,594	0,3044	Valid
2	0,524	0,3044	Valid
3	0,411	0,3044	Valid
4	0,397	0,3044	Valid
5	0,416	0,3044	Valid
6	0,411	0,3044	Valid
7	0,452	0,3044	Valid
8	0,428	0,3044	Valid
9	0,512	0,3044	Valid

10	0,479	0,3044	Valid
11	0,349	0,3044	Valid
12	0,401	0,3044	Valid
13	0,361	0,3044	Valid
14	0,402	0,3044	Valid
15	0,407	0,3044	Valid
16	0,373	0,3044	Valid
17	0,490	0,3044	Valid
18	0,308	0,3044	Valid
19	0,317	0,3044	Valid
20	0,499	0,3044	Valid
21	0,462	0,3044	Valid
22	0,342	0,3044	Valid
23	0,428	0,3044	Valid

Sumber : Data oleh SPSS Versi 22.0

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X₂)

No item	R _{xy}	R _{tabel (5%)}	Keterangan
1	0,346	0,3044	Valid
2	0,538	0,3044	Valid
3	0,651	0,3044	Valid
4	0,673	0,3044	Valid
5	0,644	0,3044	Valid
6	0,607	0,3044	Valid
7	0,471	0,3044	Valid
8	0,609	0,3044	Valid
9	0,360	0,3044	Valid
10	0,326	0,3044	Valid

Sumber : Data oleh SPSS Versi 22.0

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No item	R _{xy}	R _{tabel (5%)}	Keterangan
1	0,323	0,3044	Valid
2	0,360	0,3044	Valid
3	0,422	0,3044	Valid
4	0,422	0,3044	Valid
5	0,464	0,3044	Valid
6	0,439	0,3044	Valid
7	0,589	0,3044	Valid
8	0,607	0,3044	Valid
9	0,502	0,3044	Valid
10	0,322	0,3044	Valid
11	0,356	0,3044	Valid
12	0,349	0,3044	Valid

13	0,328	0,3044	Valid
14	0,360	0,3044	Valid
15	0,528	0,3044	Valid

Sumber : Data oleh SPSS Versi 22.0

Hasil perhitungan uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua harga r hitung $>$ r tabel pada nilai signifikansi 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item dalam angket penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

1.1.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus uji *Cronbach Alpha*. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.70

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Hasil Hitungan	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	0,842	23	0,842 $>$ 0,70	Reliabel
Transparansi (X_2)	0,828	10	0,828 $>$ 0,70	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,790	15	0,790 $>$ 0,70	Reliabel

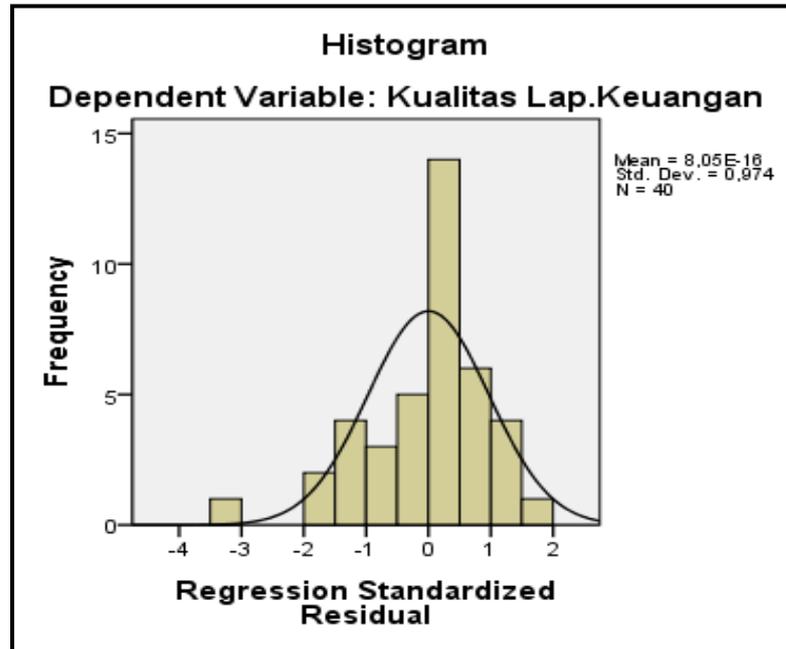
Sumber : Data oleh SPP Versi 22.0

1.1.8. Uji Asumsi Klasik

1.1.8.1. Uji Normalitas Data

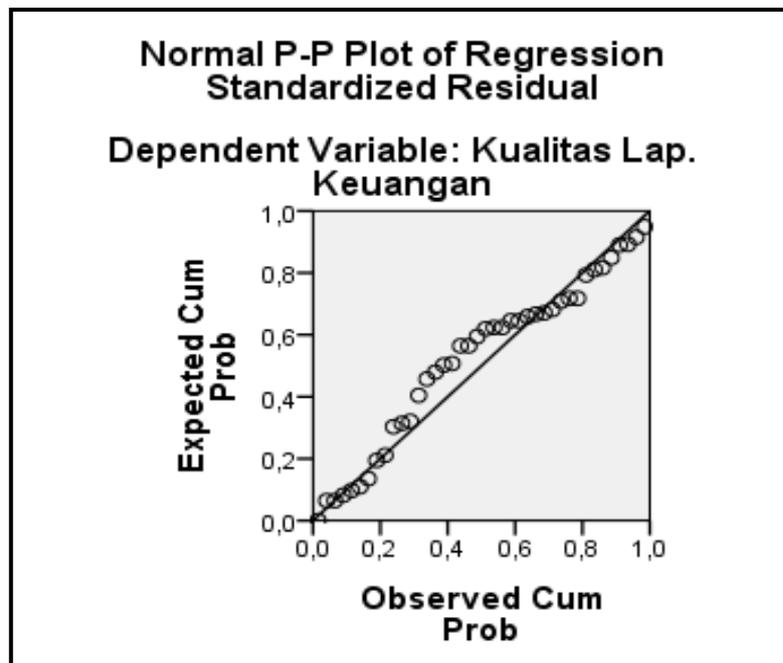
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Distribusi normal dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability plott, serta uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dinyatakan bahwa penyebaran data dinyatakan mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Data oleh SPSS Versi 22.0

Gambar 4. 3 Grafik Histogram



Sumber : Data oleh SPSS Versi 22.0

Gambar 4. 4 Grafik Normal Probability Plott

Dan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan P-P Plot diatas dikatakan berdistribusi normal ketika plot data (sebaran data) mengikuti garis linear.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-1688202
	Std. Deviation	3,18524745
Most Extreme Difference	Absolute	,137
	Positive	,084
	Negative	-,137
Test Statistic		,137
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,57 ^c

- a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
c. Liliefors Significance Correction

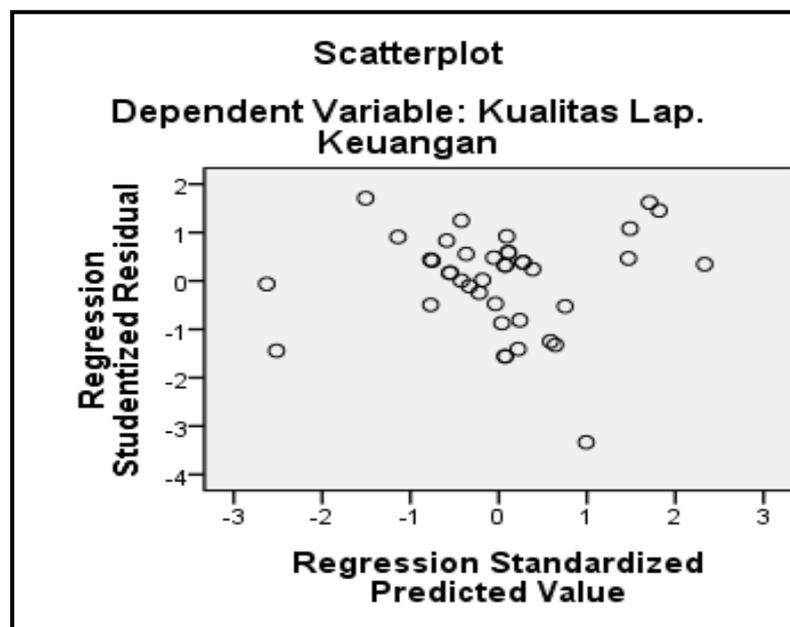
Sumber: Data oleh SPSS Versi 22.0

Pada hasil uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) dapat diketahui nilai signifikan $0,57 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

1.1.8.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang akan berakibat adanya keraguan (ketidak akuratan) pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. Dalam melihat gambar scatterplot, syarat yang perlu dipenuhi adalah jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya

diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola.



Sumber: Data oleh SPSS Versi 22.0

Gambar 4. 5 Gambar Scatterplot Uji heteroskedastisitas

Pada gambar diatas dapat dilihat tidak ada pola yang jelas atau menyebar, titik-titik penyebaran berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.9. Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.9.1. Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan taraf signifikansi 5% melalui kriteria:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya signifikansi.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak, artinya tidak signifikansi.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,878	6,896		4,333	,000
Akuntabilitas	,073	,076	,103	3,968	,039
Transparansi	,735	,105	,746	6,989	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Lap.Keuangan

Sumber: Data oleh SPSS Versi 22.0

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan hasil penelitian secara individual sebagai berikut:

1. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,968 > 2,026$ dengan nilai sig $0,039 < 0,05$ maka H_a diterima, ini berarti variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Medan.
2. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,989 > 2,026$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, ini memberikan arti bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Medan.

4.1.9.2. Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F akan menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersamaan. Kriteria yang menentukan ada atau tidaknya pengaruh signifikan 5% adalah:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya signifikansi.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak, artinya tidak signifikansi.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	623,949	2	311,974	29,088	,000 ^b
Residual	396,826	37	10,725		
Total	1020,775	39			

a. Dependent Variable: Kualitas Lap.Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data oleh SPSS Versi 22.0

Dari tabel 4.7 hasil uji simultan dibuktikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $29,088 > 3,25$ dengan nilai *sig* $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima. Hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel bebas (akuntabilita dan transparansi) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Medan.

4.19.3. Uji Koefisien Determinasi R^2

Nilai koefisien determinasi (R^2) berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat dengan syarat adanya signifikansi di dalam uji-F.

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,782 ^a	,611	,590	3,27491

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kualitas Lap.Keuangan

Sumber: Data oleh SPSS Versi 22.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,611 atau setara 61,1%. Hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya ($100\% - 61,1\% = 38,9\%$) dipengaruhi oleh faktor lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.9.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 9 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,878	6,896		4,333	,000
Akuntabilitas	,073	,076	,103	3,968	,039
Transparansi	,735	,105	,746	6,989	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Lap.Keuangan
Sumber: Data oleh SPSS Versi 22.0

Berdasarkan hasil uji regresi linear pada tabel 4.9 diatas, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 29,878 + 0,073X_1 + 0,735X_2 + e$$

Rumus persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 29,878 menunjukkan arti bahwa jika variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai 0, maka kualitas laporan keuangan memiliki tingkat kualitas sebesar 29,878.

2. Nilai koefisien akuntabilitas (b_1X_1) sebesar 0,073 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa apabila akuntabilitas meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan akan meningkat 0,073 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai positif pada koefisien mengandung arti bahwa terjadi pengaruh atau hubungan yang positif antara akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan, semakin tinggi akuntabilitas maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan, begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien transparansi (b_2X_2) sebesar 0,735 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa apabila transparansi meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan akan meningkat 0,735 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai positif pada koefisien mengandung arti bahwa terjadi pengaruh atau hubungan yang positif antara transparansi dengan kualitas laporan keuangan, semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin meningkat pula kualitas laporan laporan keuangan, begitu juga sebaliknya.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada masa pandemi *Covid-19* di kantor Wali Kota Medan. Berdasarkan hasil pengujian analisis, maka interpretasi hasil pembahasan penelitian dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Hasil penelitian hipotesis mendukung bahwa variabel Akuntabilitas(X_1) berpengaruh parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t yang menghasilkan angka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $3,968 > 2,026$ diikuti dengan nilai *sig* $0,039 < 0,05$, ini berarti H_a diterima dan H_o ditolak. Selanjutnya diperoleh persamaan regresi yang menghasilkan angka positif yang membuktikan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2019) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengendalian Intern, Dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Klaten”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin berkualitas dengan adanya penerapan akuntabilitas yang tinggi.

Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Chairani (2020) juga memperoleh hasil yang sama yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti memiliki peran penting demi terciptanya sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini sesuai dengan konsep teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Teori Keagenan. Teori ini menyangkut pemahaman bahwa terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*.

Teori keagenan dapat ditemui dari pendapat Mardiasmo (2018) mengenai akuntabilitas yang mengandung arti bahwa dalam dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*. Dengan mengedepankan kejujuran dan tanggungjawab dalam pengelolaan pemerintahan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki informasi yang berkualitas dan bermutu tinggi.

2. Analisis Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan terlihat bahwa variabel Transparansi (X_2) berpengaruh parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan hasil uji-t yang bernilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $6,989 > 2,026$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Diikuti dengan hasil uji regresi linear berganda yang menghasilkan nilai positif yang mengandung arti bahwa terjadi pengaruh atau hubungan yang positif antara transparansi dengan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sriwijayanti (2018) yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD secara parsial. Penelitian dari Chairani (2020) yang menunjukkan hasil bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses

langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Transparansi menjamin akses kebebasan atau keterbukaan memperoleh informasi atas segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan entitas merupakan bagian dari agensi teori yang digunakan oleh peneliti.

3. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Hasil uji regresi linear berganda menggunakan pengujian hipotesis berdasarkan uji-F memperoleh nilai sebesar $29,088 > 3,25$ dengan sig $0,000 < 0,05$. Terbukti $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai $sig < 0,05$ maka dengan ini H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan hasil koefisien detreminasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 61,1%.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairani (2020) yang memberikan hasil bahwa secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Penelitian Prakoso (2019) juga memberikan hasil yang sama bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta diikuti dengan penelitian Sriwijayanti (2018) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBD baik secara parsial maupun simultan.

Dengan ini terbukti bahwa dalam penelitian ini secara simultan diperoleh hasil variabel-variabel bebas berpengaruh bersama-sama

terhadap variabel terikat atau variabel Akuntabilitas(X_1) dan variabel Transparansi(X_2) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan(Y).

4. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Kota Medan

Tepat tanggal 24 Februari 2020, Pemerintah Kota Medan menyerahkan laporan keuangan *unaudited* kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK mendapat amanat untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan *unaudited* diterima.

BPK mencatat 2 permasalahan signifikan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan TA 2019 sehingga diperoleh hasil opini *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* yang sama dengan hasil 4 tahun terakhir.

Tanggal 29 Maret 2021, Kota Medan kembali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk anggaran Tahun 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., C.A., CSFA kepada Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dan Ketua DPRD Medan,

Hasyim, S.E., dengan hasil opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*. Opini WTP terhadap LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini telah sesuai syarat serta ketentuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sumut selama kurun waktu yang ditentukan. Pemko Medan telah menunjukkan kepatuhan dan upaya perbaikan atas permasalahan-permasalahan. Maka, BPK mencatat tidak ada lagi permasalahan signifikan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, maka dinyatakan Pemerintah Kota Medan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan TA 2020 terbukti dengan diraihny opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa kondisi darurat *Covid-19* tidak melunturkan semangat bekerja pengelola keuangan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pengelola keuangan mampu memegang amanah serta telah memenuhi tanggungjawab atas penggunaan anggaran dimasa pandemi *Covid-19* yang direalisasikan secara tepat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas dan dapat dipercaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di bahas di bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Akuntabilitas (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Medan. Terlihat $t_{hitung} (3,968) > t_{tabel} (2,026)$, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Variabel Transparansi (X_2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Medan. Terlihat $t_{hitung} (6,989) > t_{tabel} (2,206)$, hal ini memberikan arti bahwa semakin terbuka pelayanan publik akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
3. Variable Akuntabilitas dan Transparansi bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Medan. Ini dibuktikan dengan $F_{hitung} (29,088) > F_{tabel} (3,25)$ yang berarti H_a diterima dan H_o ditolak.
4. Hasil uji koefisien determinasi memperlihatkan nilai R-Square = 0,611 atau 61,1%. Ini menunjukkan arti bahwa sebesar 61,1% variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, selebihnya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5. Kota Medan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut untuk TA 2020 sesuai dengan syarat dan ketentuan hasil pemeriksaan.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan untuk dapat mempertahankan kinerja para pemegang amanah agar tetap mampu menghasilkan opini WTP ditahun-tahun berikutnya. Semakin meningkatkan rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tetap memperhatikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sehingga pengelola keuangan dapat terus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas meski terhalang situasi yang melemahkan negara seperti adanya pandemi *Covid-19*.
2. Selain variabel independen yang dibahas dalam penelitian ini, pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan prinsip-prinsip lain diluar akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip *Good Governance* demi demi pemenuhan hak publik.
3. Dengan adanya perwakilan Kota Medan yang baru 2021 ini, penulis sangat mengharapkan adanya aparatur-aparatur yang lebih berkompeten dari

sebelumnya agar pengelolaan keuangan daerah Kota Medan lebih maju dan masyarakat Kota Medan mendapatkan kesejahteraan lebih baik dari tahun sebelumnya.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memodifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah *time series* data. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan peneliti

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, B. Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Sektor Publik. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Alda. (2002). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap AKuntabilitas Kinerja Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan. *Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*.
- Asroel, R. B. (2016, Februari). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan dan Pengendalian Internal Terhadap penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *JOM Fekon, Volume 3, No.1*, 867-880.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*. (t.thn.).
- Chairani, K. (2002). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, Dan Pemanfaatn Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru. *SKRIPSI*.
- Darman. (2015, Desember 18). *Keuangan Daerah* . Dipetik Desember 04, 2020, dari <http://theorykeuangaandaerahblogspot.com/2015/agency-theory.html?m=1>
- Drs. Arifin Sabeni, C. (t.thn.). *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi 4* . Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. (2006). *Transparansi Pelayanan Publik* . Yogyakarta: Gadjah Maja University Press.
- Erniati. (2019, September 06). *KPPN DJPb*. Dipetik Desember 05, 2020, dari djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data/publikasi/berita-terbaru/2386-laporan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara-html
- Focus Group Discussion Dosen-Dosen Departemen Akuntansi, F. E. (2020). *Implementasi Kebijakan Keuangan di pemerintah Pusat dan Daerah*.

- Fuji Silvia Utami, D. P. (2020). Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Padang Dalam Penanganan Covid-19 Kepada Masyarakat. *Universitas Bung Hatta*.
- Franita, R. (2020). Efektifitas Audit Internal Di Tengah Wabah Covid. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 482-488.
- Ghozali, I. (2011). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang : Yoga Pratama.
- Hehanussa, S. J. (2015, May). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Akseibilitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting and Management, Volume 2, No.1*, 82-88.
- Indrawan, M. I., & Tumiran, F. R. Character Education and Local Wisdom through Weaving ULOS Balige to wards Sigulati Geopark Area as Cultural Tourism.
- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia.
- Kusuma, M. (2012, September). Pengaruh AKuntabilitas Terhadap Tranaparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Politeknik Cahaya Surya Kediri, Volume 2, No.2*.
- Lilis Saidah Napisah, C. T. (2020, Juli). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 6, No.2*, 79-88.
- Lucy Auditya, H. L. (2013). Analisis pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness, Volume 3, No.1*, 1-41.
- Maani, K. D. (2018, November). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance, Volume 8, No.1* .
- Nst, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal AKuntansi & Keuangan, Volume 2, No.3*, 149-162.
- Nst, D. A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Medan : Uwais Inspirasi Indonesia .
- Pancawati HArdiningsih, R. M. (2019, Juni). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 2, No.1*, 21-42.

Panggabean, F. Y. (2019, November). KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA BERDASARKAN OPINI AUDIT. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS, Jurnal Program Studi Akuntansi, Volume 5, No.2*, 151-159.

Panggabean, F. Y. (2018, Agustus). PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI KANTOR KECAMATAN KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Volume 9, No.1* , 80-96.

Pemerintah Kota Medan : [https://pemkomedan.go.id/Pemko medan](https://pemkomedan.go.id/Pemko_medan), 2021 : https://web.facebook.com/PemkoMedan/posts/setelah-bertahun-tahun-mendapat-opini-wajar-dengan-pengecualian-wdp-akhirnya-pem/3990431247691573/?_rdc=1&_rdr

Peran Badan Pengawas Keuangan dan Dewan perwakilan Daerah Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah Daerah . (2020, Desember 02). Jakarta, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 .

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Tentang Komite Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (t.thn.).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan .

- Prakoso, D. A. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (Studi Empiris di BPKD Kabupaten Klaten). *SKRIPSI*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta : ANDI.
- Putu Ubapaya Rama Mahaputra, W. P. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 8, No.2, 230-244*.
- Ramadhani, A. (2019). Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja pemerintah Daerah OKU Timur. *SKRIPSI*.
- Rusdiyanto, S. M. (2019). *Good Corporate Governance*. Gresik: PT. Refika Aditama.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(2)*, 138-150.
- Saragih, M. G., Surya, E. D., & Mesra, B. (2021). The Effect of Epistemic Value on Tourists Revisit Intention in Lake Toba with Satisfaction as Mediation Variable. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4)*, 8565-8572.
- Sarip, A. S. (2020, Juni). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Volume 5, No.1*, 10-20.
- Sriwijayanti, H. (2018, April). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Volume 7, No.8*, 88-100.
- Suci Indah Hanifah, S. P. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 4, No.8*, 1-15.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, P. D. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta : ANDI.

Tarigan, E. P. (2013, May). Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Volume 17, No.1*, 29-45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (t.thn.).

Wendi Adha, D. V. (2014, Oktober). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai). *JOM VEKOM, Volume 1, No.2*.

Werang, D. B. (2015). *Pendekatan Kuantitatif Dalam penelitian Sosial* . CALPULIS.

Wikipedia. (2020, Juni). Dipetik Desember 04, 2020, dari https://idm.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2

Wikipedia. (2020). Dipetik November 20, 2020, dari https://enm.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic-in-Indonesia

Zakarya, R. (2020, September). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh BPK Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume 2, No.1* , 112-123.

Zitri, I. (2020, Oktober). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes). *Journal of Government and Political Studies, Volume 3, No.2*, 70-87.